

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Inspektorat Kabupaten Tapin



Jalan Brigjen H Hasan Basry No 22 Telp (0517) 31601
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71111

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Inspektorat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, 1 Maret 2024

Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH., MH
NIP. 19700722 200501 1013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	21
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	22
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	22
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	23
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	25

3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	27
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	32
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	36
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	38
3.2	Realisasi Anggaran	40
 BAB IV PENUTUP		43
LAMPIRAN		45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023.....	7
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023	9
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	11
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	12
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	22
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	23
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	25
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	27
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	32
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	36
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	38
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tapin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Inspektorat Kabupaten Tapin:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin, Inspektorat mempunyai tugas: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:

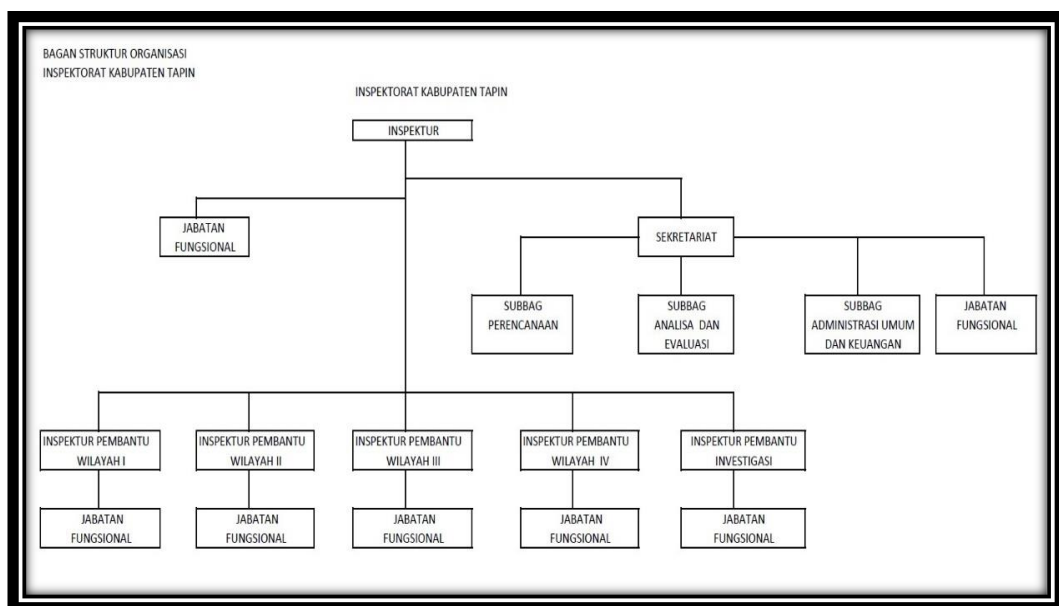
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Inspektorat Kabupaten Tapin. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin

Sumber : Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tapin:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2022	Rp 16.162.792.332,-
APBD	Tahun 2023	Rp 17.845.840.426,-

Sumber : DPA Inspektorat 2022 dan 2023

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Inspektorat Kabupaten Tapin adalah Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
		Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3	3	3	3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat		Nilai SAKIP Inspektorat	71	71	71	72	72
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	71	71	71	72	72
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat		Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	81	82	83	84	85
		Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	81	82	83	84	85

Sumber: Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Periode 2018 - 2023

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah yang	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dikeluarkan oleh BPKP		
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Nilai	Level Kapabilitas APIP adalah hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah oleh BPKP	LHE atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah hasil nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP	LHE atas nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	Nilai SAKIP Inspektorat adalah hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	LHE atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	Nilai SAKIP Inspektorat adalah hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	LHE atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	Nilai	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) adalah hasil pengukuran Indeks profesionalisme ASN oleh BKN	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) oleh BKN	Hasil pengukuran Indeks profesionalisme ASN Inspektorat oleh BKN
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	Nilai	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) adalah hasil pengukuran Indeks profesionalisme ASN oleh BKN	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) oleh BKN	Hasil pengukuran Indeks profesionalisme ASN Inspektorat oleh BKN

Sumber: Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana

Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Tapin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3
		Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3
		Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	3
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat		Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	72
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	72
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat		Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	Nilai	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	Nilai	85

Sumber: Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Inspektur Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3
2	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72
5	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	85

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3	3
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100
		Perencanaan Kinerja	24
		Pengukuran Kinerja	22
		Pelaporan Kinerja	11

		Evaluasi Internal	17
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4
II	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12

		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1
4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
1)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100
1)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39

3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12

6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100
1)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	93
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12

VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	3
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	23

		Kinerja Pemerintah Daerah	
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15
3)	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18
4)	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2
5)	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12
6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100
1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1
2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4

		Dengan Tujuan Tertentu	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1
2)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1
II	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah SKPD yang mengusulkan predikat WBK hingga TPN	3
1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan	13

		Pemerintahan Daerah	
2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	24
3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5
4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100	Sangat Tinggi	LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP
2	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	3	2,738	91,26	Sangat Tinggi	LHE atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	2,900	96,66	Sangat Tinggi	LHE atas nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72	72,7	100,97	Sangat Tinggi	LHE atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP
5	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	85	53	62,35	Rendah	Hasil pengukuran Indeks profesionalisme ASN Inspektorat oleh BKN

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Utama/Sasaran Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Dari 5 (lima) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tapin 4 (Empat) sasaran strategis dengan kategori sangat tinggi dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kategori rendah

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,038	3,038	3,067	3	3,013	100,43
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	2	2,71	3	3	100
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko			2,80	3	2,738	91,26
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			2,77	3	2,900	96,66
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	84,62	71,35	71,35	72	72,7	100,97
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	84,62	71,35	71,35	72	72,7	100,97
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-				85	53	62,35

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		ASN) Inspektorat						
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat				85	53	62,35

Sumber : LKIP Inspektorat 2020,2021,2022 dan Laporan Capaian Kinerja Utama/Sasaran Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Untuk indikator kinerja Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat tidak dilakukan perbandingan dengan capain kinerja dengan beberapa tahun terakhir hal ini dikarenakan Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat merupakan indikator kinerja yang baru muncul tahun 2023. Sementara untuk indikator kinerja lainnya terlihat penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan formula perhitungan yang baru.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Tapin periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,013	3	100,43
	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	3	3	100
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	2,738	3	91,26
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,900	3	96,66
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72,7	72	100,97
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72,7	72	100,97
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-	53	85	62,35

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		ASN) Inspektorat			
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	53	85	62,35

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Utama/Sasaran Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Secara garis besar seluruh indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin telah memenuhi Target Akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin, kecuali terkait Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat yang masih belum mencapai target akhir rencana strategis Inspektorat.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,013	Berdasarkan data BPKP Pusat 2022 sebanyak 422 K/L/Pemda telah mencapai maturitas	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
				SPIP level 3 dari 624 K/L/Pemkab/kota sementara menurut data BPKP Kalsel Tahun 2023 dari 14 Pemda di wilayah Kalsel sebanyak 13 Pemda telah mencapai maturitas SPIP level 3	
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	Berdasarkan data BPKP Pusat 2022 dari 623 Pemkab/Kota sebanyak 341 Pemkab/Kota telah mencapai kapabilitas APIP level 3 sementara menurut data BPKP Kalsel 2023 dari 14 Pemda di wilayah Kalsel sebanyak 13 Pemda telah mencapai kapabilitas APIP level 3	
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian	Indeks Manajemen Risiko	2,738	sebanyak 78 Pemda telah mencapai MRI level 3 dari 508 Pemkab/kota sementara menurut data BPKP Kalsel	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	pelaksanaan pembangunan			Tahun 2023 dari 14 Pemda di wilayah Kalsel sebanyak 13 Pemda telah mencapai maturitas MRI level 3	
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,900	Berdasarkan data tahun 2022 hanya sebanyak 16 Pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik data BPKP Pusat 2022 sementara untuk wilayah Kalsel hanya 3 Pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik data BPKP Perwakilan Tahun 2023	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72,7	Berdasarkan data rekapitulasi Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Masih terdapat 1 (satu) SKPD kategori CC 1 (satu) SKPD kategori B dan 43 (Empat Puluh Tiga) SKPD kategori BB sementara untuk nilai Kabupaten masih di posisi B	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
				berdasarkan laporan kinerja 2022 MenpanRB persentase terbesar nilai kabupaten/kota masih diposisi B dengan rentang nilai (>60-70)	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72,7	Berdasarkan data rekapitulasi Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Masih terdapat 1 (satu) SKPD kategori CC, 1 (satu) SKPD kategori B dan 43 (Empat Puluh Tiga) SKPD kategori BB sementara untuk nilai Kabupaten masih di posisi B. Berdasarkan laporan kinerja 2022 MenpanRB persentase terbesar nilai kabupaten/kota masih diposisi B dengan rentang nilai (>60-70)	
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-	53	Berdasarkan Register IP ASN Kabupaten Tapin	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		ASN) Inspektorat		Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat masuk 10 besar tertinggi sementara berdasarkan data BKN Regional VIII tahun 2022 seluruh Pemda diwilayah BKN Reg VIII IP-ASN semua maih di predikat sangat rendah. Berdasarkan data BKN Pusat pengukuran IP ASN secara Nasional Tahun 2021 sebesar 44.60 dengan kategori sangat rendah	
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	53	Berdasarkan Register IP ASN Kabupaten Tapin Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat masuk 10 besar tertinggi sementara berdasarkan data BKN Regional VIII tahun 2022 seluruh Pemda diwilayah BKN Reg VIII IP-ASN	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
				semua masih di predikat sangat rendah. Berdasarkan data BKN Pusat pengukuran IP ASN secara Nasional Tahun 2021 sebesar 44.60 dengan kategori sangat rendah	

Sumber : Laporan Kinerja BPKP Pusat 2022, Laporan Kinerja BPKP Kalsel 2023, Rekapitulasi Evaluasi SAKIP 2023, Laporan Kinerja MenpanRB 2022, Laporan Kinerja BKN Regional VIII 2022, Laporan Kinerja BKN Pusat 2022

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,013	100,43	Melaksanakan Penjaminan Kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Mendorong SKPD untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik serta mendampingi proses persiapan,

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan bimtek penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.	penilaian mandiri pada SKPD
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100	Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BPKP perwakilan Kalsel dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP	Melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP secara periodik. Memotivasi dan menumbuhkan kesadaran jajaran APIP tentang pentingnya peningkatan kapabilitas APIP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	3	2,738	91,26	Melakukan pembinaan dan pendampingan Manajemen Risiko pada SKPD	Mendampingi proses penyusunan kebijakan manajemen risiko SKPD dan mendampingi proses pelaksanaan manajemen risiko SKPD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	2,900	96,66	Penerapan sistem pengendalian korupsi melalui <i>Fraud Control Plan</i> (FCP) maupun <i>Fraud Risk Assesment</i> (FRA).	Meningkatkan kegiatan bersifat represif, preventif dan edukatif untuk meningkatkan kualitas pengendalian korupsi.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72	72,7	100,97	Telah menyusun kembali pohon kinerja sesuai kaedah PermenpanRB No 89 Tahun 2021. Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja sesuai PermenpanRB No 53 Tahun 2014.	Mendorong pemanfaatan pohon kinerja dan menuangkanya ke dalam dokumen perencanaan. Menyempurnakan kualitas penjenjangan kinerja. Mengoptimalkan pengukuran kinerja dengan menerapkan <i>reward and funishment</i> .
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72	72,7	100,97	Telah menyusun kembali pohon kinerja sesuai kaedah PermenpanRB No 89 Tahun 2021.	Mendorong pemanfaatan pohon kinerja dan menuangkanya ke dalam dokumen perencanaan. Menyempurnakan kualitas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja sesuai PermenpanRB No 53 Tahun 2014.	penjenjangan kinerja. Mengoptimalkan pengukuran kinerja dengan menerapkan <i>reward and funishment</i> .
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	85	53	62,35	Hasil pengukuran IP-ASN Inspektorat masih rendah dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam/tahun.	Mendorong SDM APIP melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam/tahun.
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	85	53	62,35	Hasil pengukuran IP-ASN Inspektorat masih rendah dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam/tahun.	Mendorong SDM APIP melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam/tahun.

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Dari beberapa indikator kinerja diatas masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum optimal hal ini akan ditindaklanjuti lebih jauh di tahun berikutnya untuk mendukung optimalisasi pencapaian target yang telah ditentukan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	3	3,013	100,43	4.129.903.060	2.904.171.406	70,32	99,29
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	3	3	100	28.290.873	8.005.750	28,30	99,71
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	3	2,738	91,26	766.864.000	520.880.000	67,92	99,25
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	3	2,900	96,66	1.268.275.320	886.523.301	69,90	99,27
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	72	72,7	100,97	3.560.850	2,417.800	67,90	99,33

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
				Capaian	(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	72	72,7	100,97	3.560.850	2,417.800	67,90	99,33
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	85	53	62,35	371.638.980	215.346.250	57,95	99,07
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	85	53	62,35	371.638.980	215.346.250	57,95	99,07

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Dalam perhitungan efektivitas dan efisiensi anggaran digunakan formula

$$Efisiensi = \frac{((Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran)}{Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja} \times 100\%$$

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan hanya tujuan dan sasaran IP ASN yang mendapatkan nilai -36,72 hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam/tahun. Kedepan pimpinan akan Mendorong SDM APIP melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam/tahun. Sementara untuk tujan dan sasaran kinerja lainnya dalam kategori baik karena masih dalam rentang -20 s.d 20.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,43	Program penyelenggaraan pengawasan	Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	113,27	Menunjang	Telah dilaksanakan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	Menunjang	Telah dilaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	91,26	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100	Menunjang	Terlaksananya asistensi penerapan manajemen risiko
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	96,66	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat	100	Menunjang	Telah dilaksanakan sosialisasi fraud control plan serta

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Yang Ditangani Tepat Waktu			pembuatan risk register fraud di lingkungan Pekab Tapin dan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pekab Tapin
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	100,97	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	Menunjang	Tersusunnya dokumen Renstra, IKU, Renja, DPA, PK, Rencana Aksi, Monev Kinerja dan Laporan Kinerja.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	100,97	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	Menunjang	Tersusunnya dokumen Renstra, IKU, Renja, DPA, PK, Rencana Aksi, Monev Kinerja dan Laporan Kinerja.
3	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	62,35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	Menunjang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/ bimbingan Teknis
	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	62,35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	Menunjang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/ bimbingan Teknis

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkendala masih rendahnya kesadaran ASN untuk melaksanakan kewajiban pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi partisipasi ASN dalam melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.614.573.163	11.524.465.857	91,36
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.560.850	2.417.800	67,90
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.293.635.127	7.605.687.270	91,71
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.869.984	1.710.000	91,44

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	371.638.980	215.346.250	57,95
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.524.762.144	2.442.885.924	96,76
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	534.019.484	492.956.597	92,31
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.159.440	142.517.463	79,11
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.927.154	620.944.553	88,09
II	Program penyelenggaraan pengawasan	4.129.903.060	2.904.171.406	70,32
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.861.627.740	2.017.648.105	70,51
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.268.275.320	886.523.301	69,90
III	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1.101.364.203	424.270.625	38,52
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	28.290.873	8.005.750	28,30
2	Pendampingan dan Asistensi	1.073.073.330	416.264.875	38,79

Sumber: Formulir Evaluasi Terhadap Renja Inspektorat Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Dari 3 Program Anggaran Inspektorat dapat dikategorikan 1 Program dengan kategori capaian Sangat Tinggi, 1 Program dengan kategori capaian Sedang dan 1 Program dengan kategori capaian rendah, hal ini dikarenakan khusus program dan kegiatan pengawasan yakni program penyelenggaraan pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Inspektorat Kabupaten Tapin masih kekurangan SDM Pengawas sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran yang mana pengawasan sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya yang mana hanya diperbolehkan 1 kegiatan yang diklaim pembayarannya walaupun ada beberapa kegiatan dalam rentang waktu penugasan yang sama. Selain itu juga ketepatan dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan perlu ditingkatkan kembali.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan 4 (empat) sasaran strategis tercapai dan 1 (satu) sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin adalah kurangnya komitmen untuk melaksanakan kewajiban pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. Kurangya sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terkait dengan kualitas pengendalian intern.

2. Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan represif, preventif dan edukatif melalui efektifitas pengendalian korupsi.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk memastikan kebutuhan konsultasi dalam peningkatan pengendalian intern.
4. Mendorong pemeuhan SDM APIP sesuai dengan standar dan memberdayakan SDM yang ada agar memiliki kompetensi yang memadai.
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Tapin, 1 Maret Tahun 2024
Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH., MH
NIP. 19700722 200501 1013

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM
Jabatan : Bupati Tapin
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023



Drs. H. M. Arifin Arpan, MM



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I

NIP. 19700722 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2023

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100%
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Minimal A
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 4
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 4
		Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	100
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	12
		Capaian nilai area Penguatan Pengawasan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.5

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Anggaran:

Rp 11.801.344.839,00
 Rp 4.080.130.340,00
 Rp 1.156.021.343,00

Keterangan

Rantau, 6 Februari 2023
 Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH, MH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19700722 200501 1 013

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM
Jabatan : Bupati Tapin
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700722 200501 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapabilitas APPIP	Level Kapabilitas APPIP	Level 3
2	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	Level 3
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 3
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	72
5	Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat	85


Program

1. Program Penujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Anggaran:

- Rp 11.801.344.839,00
- Rp 4.080.130.340,00
- Rp 1.156.021.343,00

Keterangan


Bupati Tapin,
Drs. H. M. Arifin Arpan, MM


Benteng, 18 September 2023
Inspektur Kabupaten
Umda Absor, SH, MH
Rembina Tk.1
NIR. 49700722 200501 1 013

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target			Rp
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan pelayanan sekretariat				Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Tapin	
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah				Nilai SAKIP (Predikat)	B	B		B		B		BB		BB		BB			Tapin	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemd (Predikat)		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			Tapin	
	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kegiatan administrasi perkantoran dengan capaian kinerja 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100%	100%	Rp 1.311.474.707	100%	Rp 1.371.365.701	100%	Rp 1.601.977.170	100%	Rp 1.710.155.947	100%	Rp 1.828.933.045	100%	Rp 1.828.933.045	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telpon internet dan air (bulan)	12	12	Rp 85.800.000	12	Rp 85.800.000	12	Rp 95.800.000	12	Rp 100.800.000	12	Rp 110.800.000	12	Rp 110.800.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu ketersediaan ATK (Bln)	12	12	Rp 48.209.000	12	Rp 48.209.000	12	Rp 100.209.000	12	Rp 110.209.000	12	Rp 120.209.000	12	Rp 120.209.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	Rp 40.500.000	12	Rp 40.500.000	12	Rp 60.500.000	12	Rp 70.500.000	12	Rp 80.500.000	12	Rp 80.500.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi (bln)	12	12	Rp 118.104.000	12	Rp 177.994.994	12	Rp 177.994.994	12	Rp 187.994.994	12	Rp 197.994.994	12	Rp 197.994.994	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (bulan)	12	12	Rp 963.861.707	12	Rp 963.861.707	12	Rp 1.057.473.176	12	Rp 1.130.651.953	12	Rp 1.179.429.051	12	Rp 1.179.429.051	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu ketersediaan peralatan kelistrikan kantor (Bln)	12	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 20.000.000	12	Rp 20.000.000	12	Rp 30.000.000	12	Rp 30.000.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12	12	Rp 16.200.000	12	Rp 16.200.000	12	Rp 32.400.000	12	Rp 32.400.000	12	Rp 42.400.000	12	Rp 42.400.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12	12	Rp 28.800.000	12	Rp 28.800.000	12	Rp 57.600.000	12	Rp 57.600.000	12	Rp 67.600.000	12	Rp 67.600.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin	

	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang representatif			Persentase Sarana dan Prasarana yang kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana yang kondisi baik	100%	100%	Rp 208.550.434	100%	Rp 218.074.288	100%	Rp 254.746.075	100%	Rp 271.948.642	100%	Rp 290.836.551	100%	Rp 290.836.551	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu ketersediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Bln)	12	12	Rp 61.704.685	12	Rp 61.704.685	12	Rp 98.376.472	12	Rp 98.376.472	12	Rp 98.376.472	12	Rp 98.376.472	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor (Bln)	12	12	Rp 12.671.000	12	Rp 22.194.854	12	Rp 22.194.854	12	Rp 22.194.854	12	Rp 41.082.763	12	Rp 41.082.763	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	21	13	Rp 134.174.749	15	Rp 134.174.749	16	Rp 134.174.749	17	Rp 151.377.316	18	Rp 151.377.316	18	Rp 151.377.316	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja			Persentase laporan yang wajib dibuat SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan/Subbag Penyusunan Program	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan laporan kinerja & keuangan yang wajib disusun	100%	100%	Rp 2.915.743	100%	Rp 3.048.896	100%	Rp 3.561.604	100%	Rp 3.802.113	100%	Rp 4.066.184	100%	Rp 4.066.184	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan/Subbag Penyusunan Program	Tapin
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (lap)	4	4	Rp 1.000.000	4	Rp 1.500.000	4	Rp 1.548.896	4	Rp 1.789.405	4	Rp 2.000.000	4	Rp 2.000.000	Subbag Penyusunan Program	Tapin
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan kegiatan (Lap)	1	1	Rp 1.915.743	1	Rp 1.548.896	1	Rp 2.012.708	1	Rp 2.012.708	1	Rp 2.066.184	1	Rp 2.066.184	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemda			Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	0%	9.25%		18.51%		27.77%		37.03%		46%		46%		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	70,22%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		Sekretaris	Tapin
	Meningkatnya Kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemda			Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat			Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	100%	100%	Rp 2.679.166.654	100%	Rp 2.801.515.909	100%	Rp 3.272.624.163	100%	Rp 3.493.618.872	100%	Rp 3.736.264.527	100%	Rp 3.736.264.527	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin

				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Tapin
				Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
				Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (lap)	187	100	Rp 1.817.320.000	100	Rp 1.817.320.000	104	Rp 2.086.500.000	112	Rp 2.217.820.000	120	Rp 2.349.140.000	120	Rp 2.349.140.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah kasus-kasus yang terselesaikan yang berkaitan dengan Pemkab Tapin (lap)	13	16	Rp 234.700.000	16	Rp 350.450.000	16	Rp 419.900.000	16	Rp 466.200.000	16	Rp 466.200.000	16	Rp 466.200.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Evaluasi Lakip	Jumlah Laporan Evaluasi Lakip (Lap)	1	1	Rp 40.250.000	1	Rp 46.849.255	1	Rp 40.250.000	1	Rp 40.250.000	1	Rp 40.250.000	1	Rp 40.250.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	jumlah laporan Hasil pemantauan (Lap)	175	100	Rp 465.296.654	100	Rp 465.296.654	104	Rp 565.974.163	100	Rp 609.348.872	100	Rp 720.674.527	100	Rp 720.674.527	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Review RKA SKPD	Jumlah hasil laporan Reviu RKA (Lap)	2	2	Rp 93.950.000	2	Rp 93.950.000	2	Rp 132.350.000	2	Rp 132.350.000	2	Rp 132.350.000	2	Rp 132.350.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Review LAKIP	Jumlah Laporan Reviu Lakip (Lap)	1	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	jumlah dokumen PKPT serta program penunjang Good Governance (dok)	1	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	Subbag Penyusunan Program	Tapin
	Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten			Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	100%	100%	Rp 135.654.811	100%	Rp 141.849.746	100%	Rp 165.703.470	100%	Rp 176.893.142	100%	Rp 189.179.071	100%	Rp 189.179.071	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APiP yang memiliki standar kompetensi (%)	85	90	Rp 122.644.811	90	Rp 128.839.746	90	Rp 152.693.470	90	Rp 163.883.142	90	Rp 176.169.071	90	Rp 176.169.071	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Tim Penilai P2UPD	Jumlah administrasi kepegawaian P2UPD yang terlayani (Org)	11	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	75,29%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		Sekretaris	Tapin

	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin			Level maturitas Penda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	2	3		3		3		3		3		3		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)			Level kapabilitas pengawas intern Minimal "Integrated" (Level 3)	2	3		3		3		3		3		3		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			PROGRAM PENUNJANG DAN PENDUKUNG GOOD GOVERNANCE	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	Rp 772.951.682	100%	Rp 808.249.995	100%	Rp 944.166.854	100%	Rp 1.007.924.826	100%	Rp 1.077.929.194	100%	Rp 1.077.929.194	Sekretaris	Tapin
				Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	63,63%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
				Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3	66,66%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Review laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan hasil Reviu (Lap)	1	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	Jumlah Temuan yang Terseseaikan (dok)	2	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Penyelesaian kerugian negara	Jumlah Kasus Yang Terseseaikan (Lap)	1	1	Rp 52.762.500	1	Rp 52.762.500	1	Rp 102.262.500	1	Rp 102.262.500	1	Rp 102.262.500	1	Rp 102.262.500	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			LHKPN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKPN (dok)	1	1	Rp 35.250.000	1	Rp 35.250.000	1	Rp 68.850.000	1	Rp 68.850.000	1	Rp 68.850.000	1	Rp 68.850.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			LHKASN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKASN (dok)	1	1	Rp 24.300.000	1	Rp 24.300.000	1	Rp 47.100.000	1	Rp 47.100.000	1	Rp 47.100.000	1	Rp 47.100.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Jumlah Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI (Lap)	4	4	Rp 35.100.000	4	Rp 35.100.000	4	Rp 67.800.000	4	Rp 67.800.000	4	Rp 67.800.000	4	Rp 67.800.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Penyerapan Anggaran keuangan Desa	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa (lap)	3	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	Sekretaris	Tapin
			Sapu Bersih Pungli	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang Saber Pungli (lap)	1	1	Rp 287.039.182	1	Rp 322.337.495	1	Rp 306.654.354	1	Rp 370.412.326	1	Rp 440.416.694	1	Rp 440.416.694	Sekretaris	Tapin
			RAD PPK	Jumlah laporan review Aksi PPK Penda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (lap)	1	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	Inspektur Pembantu Wilayah II	Tapin

			Unit Pengendalian Gratifikasi	jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (lap)	4	4	Rp 35.800.000	4	Rp 35.800.000	4	Rp 48.800.000	4	Rp 48.800.000	4	Rp 48.800.000	4	Rp 48.800.000	Subbag Penyusunan Program	Tapin
			Satgas Kapabilitas APIP & SPIP	Jumlah Laporan Self Assesment Kapabilitas APIP (Lap)	4	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Meningkatnya Sistem Informasi Pengawasan			Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI BIDANG PENGAWASAN	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%	100%	Rp 600.053	100%	Rp 627.455	100%	Rp 732.970	100%	Rp 782.466	100%	Rp 836.811	100%	Rp 836.811	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Jumlah Laporan ikhtisar Hasil Pengawasan (Lap)	1	1	Rp 600.053	1	Rp 627.455	1	Rp 732.970	1	Rp 782.466	1	Rp 836.811	1	Rp 836.811	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor 700/028/Evaluasi SAKIP/WIL.IV/VII/INSP/2023
Tanggal 14 Agustus 2023

INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

Nomor : 700/028/Evaluasi
Sakip/WIL.IV/VII/INSP/2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2022

Rantau, 14 Agustus 2023

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten Tapin
Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan Inspektorat Kabupaten Tapin Sangat Baik (predikat BB) dengan nilai 72,7. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta

pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon III/koordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai		Bobot		Nilai		
	2020`	2021	2020	2021/2022	2020	2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	30	28,35	23,10	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	25	30	21,88	21,00	21,00
c.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja	15	15	13,34	10,50	11,10
d.	Evaluasi Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	6,70	16,75	17,50
e.	Capaian Kinerja		20		14,36		
	Nilai Hasil Evaluasi		100	100	84,62	71,35	72,7
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A	BB	BB

Inspektorat Kabupaten Tapin telah berupaya terus melakukan perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . Namun demikian masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas Implementasi SAKIP , yaitu :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi.

2. Pelaporan Kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Bapak agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi.
2. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar seluruh rekomendasi ditindaklanjuti dan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Kami mengharapkan agar Bapak dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Bapak beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Inspektur Kabupaten Tapin,

Unda Absori, SH.MH

Pembina Tk.I

NIP.19700722 200501 1 013